



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

Dinas Perhubungan terbentuk dari pemisahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan efektif kembali sejak Bulan Januari Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Seiring dengan pemisahan tersebut, tugas pokok dan fungsi direvisi dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur tersendiri melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013.

Berdasarkan struktur organisasi yang diturunkan dari kedua peraturan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang memiliki 32 orang pejabat struktural terdiri dari:

- Eselon II.b, Kepala Dinas sebanyak 1 orang,
- Eselon III.a, Sekretaris sebanyak 1 orang,
- Eselon III.b, Kepala Bidang sebanyak 4 orang,
- Eselon IV.a, Kasi sebanyak 12 orang, Kasubag sebanyak 3 orang, Ka.UPT. sebanyak 6 orang,
- Eselon IV.b, sebanyak 5 orang.

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

I. TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN :

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan

- Fungsi** : - Merumuskan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan
 - Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas Perhubungan
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kota Padang



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

NO	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1	Retribusi Pelayanan Pakir di Jalan Umum	4.245.282.500	1.439.568.000	33,91
	* Retribusi Terminal Truck	541.000.000	228.111.000	42,16
	* Harian	3.044.282.500	1.065.403.000	35,00
	* Bulanan	660.000.000	146.054.000	22,13
2	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	2.902.384.000	1.846.999.000	63,64
3	Retribusi Jasa Usaha Terminal	282.640.000	290.478.000	102,77
4	Ret. Pelayanan Pelabuhan	389.117.132	288.081.200	74,03
5	Ret. Jasa Usaha Izin Trayek	760.000.000	375.600.000	49,42
6	Lain-Lain PAD yang Sah			
	Pelayanan BRT	10.452.778.000	8.031.612.032	76,84
	Kontribusi Parkir Meter PT. Mata	355.000.000	-	-
JUMLAH		19.387.201.632	12.272.338.232	63
	TUNGGAKAN			
7	Ret. Parkir Tepi jalan umum	867.847.632	171.686.000	19,78
8	Ret. Jasa Usaha Terminal	125.358.860	-	-
9	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	127.735.000	-	-
JUMLAH		1.120.941.492	171.686.000	15,32
	DENDA			
10	Denda Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	76.638.000	77.417.200	101,02
11	Denda Ret. Izin Trayek	-	-	-
JUMLAH		76.638.000	77.417.200	101,02
TOTAL		20.584.781.124	12.521.441.432	60,83

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBDP Kota Padang Tahun 2018 untuk Dinas Perhubungan Kota Padang didukung anggaran sebesar Rp. 35.543.820.106,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Rupiah) yang dibagi dalam Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp. 12.869.574.221,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 22.674.245.885,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam



Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Pada Belanja Tidak Langsung realisasi fisik sebesar 90,00% dan realisasi keuangan sebesar 88,41%. Sedangkan dalam Belanja Langsung dibagi dalam 10 program dan 51 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 95,00 dan realisasi keuangan sebesar 93,89 atau Rp. 21.288.310.690,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

a. Belanja Tidak Langsung

No	Kegiatan	Realisasi		Keterangan
		Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5
1.	Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 9.116.254.220,68,-	100	92,74	
2.	Tambahan Penghasilan PNS Rp. 2.953.320.000	100	98,99	
3.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 800.000.000,-	-	-	

b. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 2.600.000,-	Terlaksananya Pembelian Materai dan pembayaran paket / pengiriman	Lancarnya operasional kantor	100	99,92
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 962.109.192,-	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya operasional kantor	100	59,41
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 27.000.000,-	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	57,37
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 34.000.000,-	Terpeliharanya peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	100	80,44
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.78.066.250,-	Terlaksananya Penyediaan ATK	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,97
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 189.999.875,-	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,76



7	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 21.375.000,-	Terlaksananya penyediaan Pembelian alat listrik dan elektronik.	Lancarnya operasional kantor	100	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 279.985.000,-	Tersedianya perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	87,64
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.18.050.000,-	Tersedia bacaan koran harian/ majalah	Tersedianya informasi	100	99,78
10	Penyediaan makanan dan minuman Rp. 33.890.000,-	Terlaksananya Makan dan Minum.	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	80,15
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 427.450.000,-	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat	100	100
12	Penyediaan alat kebersihan Rp. 21.500.000,-	Terlaksananya penyediaan alat kebersihan	Lingkungan kantor yang bersih	100	98,72
13	Penyediaan jasa pelayanan publik 149.100.000,-	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan publik	Terpenuhinya kebutuhan pegawai honorer	100	99,75
14	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.015.560.000,-	Jumlah pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang dibayar	Terpenuhinya kebutuhan pegawai honorer	100	99,15

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan mebeleur Rp. 52.411.500,-	Tersedianya meja kerja	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	89,69
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 586.681.262,-	Terawatnya kendaraan dinas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	92,59
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.000.000,-	Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan/meubeler gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,90



4	Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Rp.42.750.000,-	Terlaksananya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon	Terawatnya alat listrik, air, dan telepon	100	99,53
5	Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor Rp. 200.000.000,-	Terlaksananya rehab sedang/berat Gedung Kantor Dishub Kota Padang	Terciptanya tempat kerja yang kreatif	100	98,97

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 325.892.250,-	Pakaian dinas dan atribut serta perlengkapannya	Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	100	99,85

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Analisa dan penilaian jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 12.575.000,-	Aparatur terdidik dan terlatih pada pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan kinerja dan profesionalisme	100	96,76

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 30.000.000,-	Laporan capaian kinerja dan keuangan Dishubkominfo Kota Padang	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan Dishubkominfo Kota Padang	100	92,81

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi dan Pengembangan Program Parkir Meter	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan program parkir meter	Terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar	50	-



Rp. 15.000.000,-				
------------------	--	--	--	--

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rp. 103.621.500,-	Terawatnya alat pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan pelayanan pada masyarakat	100	99,07
2.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Trans Padang Rp. 106.540.000,-	Terawatnya sarana prasarana Trans Padang	Peningkatan pelayanan pada masyarakat	100	69,16

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan Rp. 45.423.750,-	Lomba awak kendaraan umum teladan	Terciptanya awak kendaraan umum yang profesional, disiplin, dan bertanggungjawab	100	97,19
2	Docking kapal patroli Rp.49.949.500,-	Terlaksananya docking kapal patroli	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,95
3	Penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor Rp. 870.162.080,-	Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	100	99,67
4	Pelaksanaan WTN Rp. 22.000.000,-	Jumlah Tersedianya Kelengkapan dan Fasilitas Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas	Terlaksananya Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas	100	74,72
5	Operasional penertiban dengan tim terpadu Rp.99.587.100,-	Terlaksananya penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan bersama tim terpadu	Tertib lalu lintas dan angkutan	100	94,58
6	Pengoperasian angkutan massal Rp. 13.694.432.520,-	Pengoperasian angkutan massal	Peningkatan PAD	100	95,88
7	Asuransi Bus Trans Padang Rp. 159.927.500,-	Tersedianya asuransi Bus Trans Padang	Pelayanan Trans Padang yang aman dan tertib	100	98,04



8	Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Rp. 52.927.875,-	Terlaksananya evaluasi dan Pengembangan Trans Padang	Meningkatnya pelayanan Trans Padang kepada masyarakat	100	98,47
9	Survey Load Factor Rp. 49.854.750,-	Terlaksananya survey load factor	Pelayanan angkutan yang tertib dan aman	100	95,00
10	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Rp. 72.544.275,-	Terlaksananya pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar	100	74,18
11	Operasional Manajemen Angkutan Kota Rp. 169.882.575,-	Terlaksananya operasional manajemen angkutan kota	Tertatanya manajemen angkutan kota	100	96,47

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
2	Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas Rp. 372.066.000,-	Terawatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Terciptanya tertib lalu lintas	100	68,77
3	Monitoring dan evaluasi keselamatan pelayaran dan SAR Rp. 59.739.250,-	Terlaksananya evaluasi keselamatan pelayaran dan SAR	Lalu lintas laut yang aman, tertib dan lancar	100	95,24
4	Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas Rp. 146.389.625,-	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan lalu lintas	Terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib	100	88,32
5	Intensifikasi penerimaan PAD Rp. 73.693.985,-	Tercapainya target PAD	Terlaksananya program pembangunan di Kota Padang	100	76,81
6	Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS) Rp. 164.222.350,-	Terlaksananya pusat kendali ATCS	Terciptanya tertib lalu lintas	100	89,70
7	Forum lalu lintas Rp. 40.214.750,-	Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padang	Lalu lintas yang aman, tertib dan lancar	100	78,95
8	Pembangunan median jalan dan road barrier Rp. 306.609.500,-	Tersedianya median jalan dan road barrier	Terciptanya tertib lalu lintas	100	99,73



9	Pengawasan dan pengendalian parkir Rp. 183.914.800,-	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian parkir	Lalu lintas yang tertib dan lancar	100	97,11
10	Keselamatan transportasi darat Rp. 869.098.921,-	Bertambahnya sarana dan prasarana lalu lintas	Terciptanya tertib lalu lintas	100	99,42
11	Pengadaan marka halte Trans Padang Rp. 149.888.750,-	Tersedianya marka Trans Padang	Lancarnya operasional Trans Padang	100	97,71
12	Pengawasan dan Pengendalian Pangkalan/ Terminal Angkutan Umum Rp. 99.559.125,-	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pangkalan/ Terminal Angkutan Umum	Tertibnya pangkalan angkutan kota	100	89,77
13	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 68.773.500,-	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	Lancarnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	100	96,42
14	Operasional Terminal Angkutan Barang Rp. 54.876.650,-	Terlaksananya Operasional Terminal Angkutan Barang	Lancarnya Operasional Terminal Angkutan Barang	100	93,41
15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalin Rp. 33.091.925,-	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalin	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	100	93,91

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Jumlah Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Aset yang Dikelola Dishub Secara Akurat	100	94,83

11. Hasil yang Dicapai SKPD Berdasarkan Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Jenis Kegiatan	Perkembangan Penganggaran		Keterangan
		2017	2018	
1.	Keselamatan Transportasi Darat			
	Belanja Marka Jalan	Rp. 452.106.000,-	Rp. 189.124.500,-	Pengadaan marka jalan tahun 2018 sepanjang 555 m
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalin	Rp. 45.000.000,-	Rp. 116.776.000,-	Pengadaan dan pemasangan rambu lalin tahun 2018 sebanyak 100 unit.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

2.	Pengadaan suku cadang rambu	Rp. 74.600.000,-	Rp. 39.600.000,-	Pengadaan suku cadang rambu tahun 2018 sebanyak 40 unit
	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Rp. 298.846.000,-	Rp. 130.271.440,-	Pengadaan dan pemasangan paku jalan sebanyak 520 .unit
	Pengadaan suku cadang ATCS	Rp. 219.500.000,-	Rp. 149.000.000,-	Pengadaan suku cadang ATCS di 22 persimpangan
	Pengadaan dan pemasangan kerangkeng	Rp. 48.600.000,-	Rp. 24.196.000,-	Pemasangan kerangkeng untuk traffict light sebanyak 10 unit
	Pengadaan Delinator Fleksibel dan Road Hum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 59.500.000,-	Pengadaan sebanyak 48 unit
	Perbaikan dan Perawatan Fasilitas Lalulintas	Rp. 182.380.000,-	Rp. 202.542.850,-	Pembersihan Box Traffict Light, pemasangan rambu, Pemasangan papan informasi, perawatan dan perbaikan pemasangan rambu lalin
3.	Penggantian Jaringan ATCS	-	RP. 131.628.560,-	1 (satu) jaringan
	Pengoperasian ATCS	Rp. 150.000.000,-	Rp. 164.222.350,-	Pemantauan, pengontrolan dan pengendalian persimpangan ATCS sebanyak 22 persimpangan dan 2 ruas jalan di Kota Padang
4.	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rp. 81.075.000,-	Rp.100.279.000,-	Servis alat uji dan kalibrasi alat uji
5.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Trans Padang	Rp. 120.000.000,-	Rp. 96.392.500,-	Jasa service peralatan/perengkapan/ meubiler, perawatan/ service CCTV Bus Trans Padang, GPS Tracking, Radio SSB dan Jaringan Listrik Halte Trans Padang, belanja modal rehab/ pemeliharaan Trans Padang, Jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan
6.	Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 826.250.000,-	Rp. 862.004.800,-	Pengadaan formulir angkutan barang kertas kuning 165 rim Formulir angkutan umum kertas HVS MERAH 54 Rim Formulir angkutan warna biru 16 rim Kartu kuning 5400 lbr Kartu induk biru 500 lbr Kartu induk merah 1214 lbr Buku uji 20.864 buku Plat uji 57.000 keping Cetak stiker kecil 20.000 lembar Cetak stiker besar 18.100 lembar
7.	Pengoperasian Angkutan Massal	Rp.9.032.857.500,-	Rp. 13.130.211.000,-	Pembayaran layanan Bus Trans Padang sebanyak 25 unit



No	Jenis Kegiatan	Perkembangan Dalam Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1.	Perkembangan Armada Darat			Tahun 2014 seluruhnya belum berbentuk badan hukum Indonesia (PO/CV) Tahun 2015 sesuai UU No. 22 Tahun 2009 telah terbentuk 22 perusahaan berbadan hukum Indonesia (PT/Koperasi) Adanya perubahan fungsi kendaraan dari plat kuning (angkutan umum) ke plat hitam (angkutan pribadi) Adanya penambahan kendaraan baru dan mutasi kendaraan dari daerah lain.
	- Perkembangan Jumlah Perusahaan Jasa Angkutan	47	47	
	- Jumlah Trayek	74	74	
	- Jumlah Angkutan Kota	2226	2220	
	- Taman Kendaraan Wajib Uji	21000	24160	
2.	Perkembangan Jumlah Armada Laut			Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kewenangan dalam pengurusan surat izin kapal terletak pada Syahbandar/KSOP pada pelabuhan kapal beada.
	- Jumlah Kapal Kecil (Penangkap Ikan)	-	-	
	- Jumlah Kapal Angkutan Barang	-	-	
	- Jumlah Kapal Wisata	-	-	
3.	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan			Termasuk dalam penghapusan asset karena kondisi plang yang sudah rusak
	- Rambu-rambu Lalu Lintas	4574 unit	4674 unit	
	- Marka Jalan	9874,4 m2	10429,4 m2	
	- Traffic Light (ATCS)	22 unit	22 unit	
	- Traffic Light	15 unit	15 unit	
	- Deliniator	220 unit	250 unit	
	- Traffic Cone	135 unit	165 unit	
	- Road Barrier (Fiber)	253 unit	273 unit	
	- Median Portable (Beton)	111 unit	161 unit	
	- Median Jalan	1825 m	2120 m	
	- Paku Jalan	1760 unit	2280 unit	
	- Portal perlintasan kereta api	13 lokasi	13 lokasi	
	- Pembatas Jalan Car Free Day	10 unit	0 unit	
	- Halte BRT (Fisik/Permanen)	43 unit	43 unit	
	- Halte BRT (Halte Tangga)	27 unit	30 unit	
	- Armada BRT (Trans Padang)	25 unit	35 unit	
	- Rambu Halte BRT	42unit	42 unit	
	- Papan Nama Halte BRT	42unit	42 unit	
	- Kunci roda larangan parkir	21 unit	21 unit	



PENERIMAAN

Jenis Penerimaan	Target 2017	Realisasi Penerimaan 2017	Realisasi 2017 (%)	Target 2018	Realisasi Penerimaan 2018	Realisasi 2018 (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.997.311.353	10.421.718.678	61,31	20.584.781.124	12.521.441.432	60,83
RETRIBUSI DAERAH	6.975.882.001	3.713.652.125	53,24	8.579.423.632	4.240.726.200	49,43
RETRIBUSI JASA UMUM	6.007.882.001	3.207.867.900	53,39	7.147.666.500	3.286.567.000	45,98
Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum	3.507.882.001	1.478.027.000	42,13	4.245.282.500	1.439.568.000	33,91
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000	1.729.840.900	69,19	2.902.384.000	1.846.999.000	63,64
RETRIBUSI JASA USAHA	968.000.000	505.784.225	52,25	1.431.757.132	954.159.200	66,64
Retribusi Jasa Usaha Terminal	468.000.000	228.401.000	48,80	282.640.000	290.478.000	102,77
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	500.000.000	277.383.225	55,48	389.117.132	288.081.200	74,03
Retribusi Jasa Usaha Izin Trayek	-	-	-	760.000.000	375.600.000	49,42
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.855.000.000	6.544.332.253	73,91	10.807.778.000	8.031.612.032	74,31
Pelayanan Bus Rapid Transit	8.500.000.000	6.544.332.259	76,99	10.452.778.000	8.031.612.032	76,84
Kontribusi Parkir Meter PT. MATA	355.000.000	-	-	355.000.000	-	-
DENDA	65.487.860	93.338.300	142,53	76.638.000	77.417.200	101,02
Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	65.487.860	90.453.500	138,12	76.638.000	77.417.200	101,02
Denda Retribusi Izin Trayek	-	2.884.800	-	-	-	-
TUNGGAKAN	1.100.941.492	70.396.000	6,39	1.120.941.492	171.686.000	15,32
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	847.847.632	67.876.000	8,01	867.847.632	171.686.000	19,78
Retribusi Jasa Usaha Terminal	125.358.860	-	-	125.358.860	-	-
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	127.735.000	-	-	127.735.000	-	-
Retribusi Jasa Usaha Izin Trayek	-	2.520.000	-	-	-	-
JUMLAH	16.997.311.353	10.421.718.678	61,31	20.584.781.124	12.521.441.432	60,83



III. PRESTASI YANG DIRAIH

Prestasi pencapaian SKPD Tahun 2018 dalam skala Propinsi antara lain :

1. Peringkat 1 Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Propinsi yang diraih oleh Putra Hakimi dari PT. Blue Bird
2. Peringkat 3 Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Propinsi yang diraih oleh Asliwardi dari PT. Danone
3. Peringkat 1 Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Propinsi yang diraih oleh Pelajar SMAN 3 Padang a.n. Nadya Aras Cahyani
4. Juara pria terfavorit Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Propinsi yang diraih oleh Pelajar SMAN 2 Padang a.n. Ifan Arenza
5. Juara wanita terfavorit Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Propinsi yang diraih oleh Pelajar SMAN 3 Padang a.n. Nadya Aras Cahyani

IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

1. Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan/realisasi fisik tidak 100%

Pada tahun 2018 ini, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu :

- Evaluasi dan Pengembangan Program Parkir Meter
Pengoperasian parkir meter ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat juru parkir yang melanggar aturan/SOP yang telah ditetapkan oleh PT.MATA, dengan tetap melakukan pungutan parkir secara tunai terhadap masyarakat di kawasan parkir meter.
 - b. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dari manajemen PT. MATA belum optimal dilaksanakan, seperti dengan pemberian punishment (sanksi) yang tegas terhadap juru parkir yang melanggar aturan, atau sebaliknya dengan pemberian reward (penghargaan) kepada karyawan/juru parkir yang berprestasi.
 - c. Belum maksimalnya upaya penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan, perlu keterlibatan pihak Kepolisian dan aparat instansi lainnya untuk diikutsertakan dalam struktur organisasi pengendalian dan pengawasan
 - d. Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tata cara penggunaan kartu dan mesin parkir meter serta penempatan counter penjualan kartu.
 - e. Dengan adanya pekerjaan pengembangan trotoar di Jalan Permindo arah sisi timur, secara langsung berdampak terhadap perubahan marka Satuan Ruang Parkir (SRP) dan pemindahan mesin parkir meter. Kondisi ini tentunya berindikasi terhadap penyempitan ruas jalan dan tidak optimalnya operasional parker meter di lokasi



tersebut

2. Penerimaan PAD tidak mencapai target 100%

Terdapat empat jenis retribusi yang pencapaiannya dibawah 50% yakni retribusi parkir terminal truk, retribusi parkir harian dan bulanan di tepi jalan umum, retribusi jasa usaha izin trayek dan kontribusi parkir meter PT. MATA. Untuk retribusi parkir terminal truk, rendahnya realisasi disebabkan karena kebanyakan para sopir tidak membayar retribusi dengan alasan mereka tidak menggunakan tepi jalan umum sebagai sarana parkir kendaraan mereka. Sementara untuk retribusi parkir harian dan bulanan di tepi jalan umum masih rendah pencapaiannya dikarenakan tumpang tindih antara PKL dengan lahan parkir yang ada, adanya beberapa retribusi parkir yang dialihkan pemungutannya menjadi pajak parkir yang mana pengelolaannya berada pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), adanya pengalihan beberapa kawasan parkir ke kontribusi parkir meter yang dikelola oleh Pihak Ketiga (PT.MATA) dan adanya beberapa lahan parkir yang ditutup demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas yaitu di Jalan Pasar Baru serta adanya dampak dari penyempitan jalan. Selain itu ada juga beberapa kendala di lapangan yaitu menyangkut akses ke terminal yang tidak sesuai dengan kondisi kendaraan/truk.

Pada Tahun 2016, Dishubkominfo Kota Padang telah melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal Pengelolaan Perparkiran di beberapa lokasi parkir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena masih adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sosialisasi dan masih adanya pungutan parkir liar yang dilakukan oleh oknum tertentu di lokasi parkir.

3. Masih kurangnya pelayanan Trans Padang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang aman, nyaman dan tertib

Pada saat ini jumlah armada Trans Padang yang beroperasi yaitu sebanyak 25 unit bus ukuran sedang yang beroperasi pada koridor I. Jumlah ini tentu masih belum bisa menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang aman, nyaman dan tertib . Maka diharapkan adanya penambahan jumlah armada Trans Padang sehingga bisa melayani semua koridor yang telah direncanakan.

4. Kompleksnya persoalan transportasi

Persoalan klasik transportasi yang dialami Kota Padang seperti halnya yang dialami kota-kota besar lainnya adalah kemacetan (*traffic jam*), terjadinya kecelakaan lalu lintas (*traffic accident*), serta polusi udara. Penyebab persoalan tersebut antara lain pertumbuhan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang jauh melampaui tingkat pertumbuhan kapasitas jalan, kurangnya kesadaran/disiplin pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, dan kurang



memadainya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Persoalan tersebut juga berdampak kepada *social and economic cost*.

5. Terjadinya arus pasang (*kongesti*) pada jam sibuk (*peak hour*)

Terkonsentrasinya pusat kegiatan di kawasan CBD menyebabkan terjadinya kongesti pada *peak hour* pagi dan sore hari. *Kongesti* adalah penggunaan ruas jalan yang sama pada waktu bersamaan dan dengan tujuan yang sama. *Kongesti* tidak dapat dielakkan apabila kebutuhan perjalanan warga kota tidak dipecah. Ditambah lagi dengan pembangunan mall dan hotel-hotel baru menimbulkan pula dampak yang signifikan bagi arus lalu lintas di kawasan tersebut.

6. Trayek dan distribusi angkutan umum belum optimal

Meskipun kajian reorganisasi trayek angkutan kota telah dilakukan, namun belum memberikan hasil optimal selama kecenderungan perjalanan masyarakat masih terkonsentrasi di kawasan CBD (*central bussiness district*)

7. Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

Keberadaan marka, rambu, halte, traffic light serta sarana dan prasarana perhubungan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu instrument menuju keselamatan lalu lintas (*traffic safety*), ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas. Keterbatasan ini semata disebabkan oleh kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padang yang masih belum memadai untuk memenuhinya.

8. Kurangnya partisipasi warga kota

Ketertiban dan keselamatan lalulintas di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku manusia, termasuk di dalamnya sopir angkutan umum. Selain dituntut untuk mengetahui dan memahami aturan lalulintas, para pengguna jalan juga dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku dengan penuh disiplin. Fakta yang ada belum seluruh pengguna jalan bisa berlaku disiplin di jalan raya sebagaimana mestinya. Disamping itu, penggunaan fasilitas transportasi untuk kepentingan lain menyebabkan kapasitas ideal fasilitas tersebut menjadi terganggu disamping juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Masalah klasik yang sering dihadapi beralih fungsinya trotoar dan badan jalan menjadi fungsi lain sehingga fasilitas transportasi tidak dapat digunakan secara optimal. Dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak dapat mengatasi persoalan tersebut secara mandiri karena menyangkut tugas pokok/kewenangan unit kerja lain dan tuntutan pihak-pihak tertentu.



9. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas

Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi. Kekurangan yang sangat signifikan adalah personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analisis sistem informasi dan *programmer*. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya hasil pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang dalam menjawab tantangan persoalan transportasi dan teknologi informasi di lapangan yang semakin dinamis.

10. Minim fasilitas Pelabuhan Teluk Bungus

Fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bugus Kota Padang masih terbatas yaitu saat ini hanya ada 1 (satu) dermaga, 1 (satu) perkantoran dan 1 (satu) gudang di atas lahan seluas 2,2 Ha.

SOLUSI

1. Upaya Adendum atau Pemutusan Kontrak

Mengupayakan penyelesaian parkir meter dengan cara adendum terhadap kontrak yang telah disetujui ataupun dengan cara melakukan pemutusan kontrak terhadap pihak pengelola (PT. MATA)

2. Melakukan penyesuaian terhadap target serta mengoptimalkan pengawasan terhadap PAD

Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pencapaian retribusi seperti retribusi perparkiran di tepi jalan umum yang membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Untuk itu perlu dilakukan penganggaran dalam mendukung kegiatan ini. Selain itu perlu adanya penyesuaian target realisasi PAD terkait dengan kondisi saat ini. Dalam hal kontribusi parkir meter, perlu dijelaskan kembali substansi tugas pokok Pemko Padang dengan Pihak Pengelola (PT. MATA) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya perlu adanya penindakan tegas terhadap pelanggaran atau pungutan parkir liar dan perlu sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan PAD, telah diupayakan Perwako tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Derek) dan pelaksanaan Parkir Inap Mobil Barang Perda Nomor 9 Tahun 2018.



3. Menambah Jumlah Armada Trans Padang

Sampai tahun 2018, armada Trans Padang sudah beroperasi sebanyak 25 unit untuk melayani rute di koridor 1 (satu). Pada tahun 2019 ini mendapat penambahan armada sebanyak 10 unit yang rencananya akan dioperasikan pada koridor IV (empat). Sehingga total armada Trans Padang yang beroperasi berjumlah 35 unit.

4. Melakukan kajian dan koordinasi dengan stakeholder

Forum Lalu Lintas merupakan wadah kerjasama dan koordinasi untuk mencari solusi mengatasi permasalahan transportasi yang makin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan secara mandiri. Diharapkan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) ini dapat dicarikan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Selain forum lalu lintas, koordinasi dan konsultasi juga giat dilakukan dengan Dinas Perhubungan Prop.Sumatera Barat dan Kementerian Perhubungan.

5. Implementasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jalan terutama pada *peak hour* pagi dan sore/malam hari, berbagai teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas telah dilakukan diantaranya pemberlakuan sistem satu arah dan larangan parkir. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya *traffic jam* dan mempertahankan waktu tempuh ideal pada ruas-ruas jalan utama dalam kota. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak ikutan yang muncul terhadap lalu lintas pada kawasan sekitarnya akibat pembangunan pusat-pusat kegiatan seperti mall dan hotel, maka Analisis Dampak Lalu Lintas menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi pengembang sebelum IMB diberikan oleh pihak terkait.

6. Kajian kinerja jaringan trayek dan distribusi kebutuhan angkutan umum

Dengan mempertimbangkan lokasi Pusat Pemerintahan di Aie Pacah, lokasi terminal penumpang tipe A (antar kota luar propinsi), dan lokasi terminal penumpang tipe B (antar kota dalam propinsi), dan terminal penumpang tipe C (angkutan kota) yang akan dibangun perlu dilakukan kajian ulang jaringan rayek dan distribusi kebutuhan angkutan umum agar terbentuk jaringan trayek yang optimal dan distribusi armada angkutan umum yang ideal. Penentuan lokasi terminal disesuaikan rencana tata ruang kota yang mendukung adanya pemecahan tujuan perjalanan dari satu CBD ke beberapa sub CBD.

7. Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dari APBN

Salah satu upaya menyaliasi minimnya kemampuan keuangan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan adalah dengan bantuan dana APBN dan dana APBD Pemprop Sumatera Barat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mensinergikan renstra Pemko Padang urusan Perhubungan dengan renstra Kementerian Perhubungan dan



renstra Pemerintah Propinsi.

8. Penegakan hukum

Operasi penertiban dalam rangka penegakan hukum tetap dilakukan untuk menjaga konsistensi dan wibawa Pemerintah Kota Padang dibidang lalu lintas. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dan kontinyu dengan institusi lain yang terkait agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

9. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan kuantitas personil, Dishub berupaya melakukan penambahan personil melalui penerimaan penempatan personil dari SKPD lain melalui BKPSDM dan juga mengusulkan penambahan tenaga kontrak melalui sistem outsourcing. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas personil ditempuh dengan mengirimkannya ke diklat teknis perhubungan. Selain itu juga telah dilakukan MOU dengan Pihak STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dalam hal rekrutman personil yang berkompeten di bidang perhubungan.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Bungus

Telah dilakukannya perbaikan terhadap sarana dan prasarana di Pelabuhan Teluk Bungus dengan menggunakan dana APBN yang dikelola oleh Balai Transportasi Darat.

Padang, Januari 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang



Drs. H. Dedi Hepidal, MM
NIP. 19620204-200609 1 001

